

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran serta masyarakat (termasuk swasta) adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan dan kemandirian pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan ini diwujudkan antara lain dengan menjalankan “hidup sehat”, peran serta penyelenggara upaya / pelayanan kesehatan dan pembiayaan pemeliharaan kesehatan. Disamping itu pembangunan di bidang kesehatan ini, diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan baru yaitu berupa :

1. Perubahan demografi dengan meningkatnya penduduk usia kerja dan usia lanjut,
2. perubahan sosio-ekonomi dengan meningkatnya industrialisasi, pendapatan perkapita dan tuntutan terhadap mutu pelayanan kesehatan masyarakat,
3. perubahan pola penyakit dengan meningkatnya penyakit tidak menular, gangguan akibat kemunduran fungsi tubuh, keganasan, dan sebagainya, serta
4. perkembangan iptek dibidang kesehatan yang disamping memberikan manfaat bagi kesehatan juga cenderung menjadikan pelayanan kesehatan menjadi lebih canggih dan mahal.

Disamping akan menimbulkan beban bagi pembangunan kesehatan, perubahan-perubahan tersebut diatas juga akan meningkatkan pembiayaan kesehatan yang bila tidak dibendalikannya dapat...

upaya kesehatan, sehingga dapat menghambat tercapainya peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas bangsa. Untuk menghindari masalah ini diperlukan perubahan dan peningkatan tiga hal, yaitu :

1. Perbaiki sistem pelayanan kesehatan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih bermutu.
2. Perbaiki sistem pembiayaan kesehatan berdasarkan dana pra-upaya, sehingga pengelolaannya lebih rasional.
3. Peningkatan peran serta masyarakat, sehingga pemeliharaan kesehatan dirasakan sebagai tanggung jawab dan usaha bersama.

Pengendalian secara terpadu ketiga hal inilah yang pada akhirnya dirumuskan sebagai JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang disahkan dalam UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang dinyatakan sebagai suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna, berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembayaran secara pra-upaya.

Dalam pelaksanaan JPKM diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku, antara lain :

1. Keputusan Menkes RI No. 326/Menkes/SK/VI/1990 tentang Strategi Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
2. Keputusan Menkes RI No. 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis
3. Peraturan Menkes RI No. 571/Menkes/Per/VII/1993 tentang Penyelenggaraan

4. Peraturan Menkes RI No. 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
5. Keputusan Menkes RI No. 378/Menkes/SK/IV/1993 tentang Penanggung Jawab Pembinaan dan Pengembangan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
6. Edaran Dirjen Binkesmas No. 382/BM/DJ/BPSM/III/1993 tentang Pengembangan Dana Sehat ber-JPKM
7. Edaran Dirjen Binkesmas No. 862/BM/DJ/BPSM/III/1993 tentang Pengembangan Dokter Keluarga dalam Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Dari undang-undang tersebut diatas dapat diketahui bahwa beban Badan Pelaksana (BAPEL) sebagai penanggung jawab pelaksanaan JPKM sangat berat, karena BAPEL harus melaksanakan fungsi pengelolaan kepesertaan, fungsi penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan, fungsi pengelolaan keuangan serta fungsi sistem informasi manajemen.

Di Kabupaten Purbalingga, peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan JPKM sangat baik sekali. Hal ini dibuktikan dengan tingginya antusiasme keikutsertaan masyarakat sebagai anggota JPKM yang dapat dilihat

No	Tahun	Jumlah Peserta JPKM
1.	2001-2002	67.707 keluarga
2.	2002-2003	73.104 keluarga
3.	2003-2004	100.184 keluarga

Sumber : BAPEL JPKM Kabupaten Purbalingga

Tabel 1.1. Jumlah peserta JPKM 3 tahun terakhir

Yang terbagi dalam tiga strata, yaitu strata I yang merupakan keluarga miskin, strata II keluarga pasca keluarga miskin dan peserta strata III keluarga non-keluarga miskin.

No	Strata	Jumlah Peserta JPKM
1.	Strata I	50.217 keluarga
2.	Strata II	28.418 keluarga
3.	Strata III	21.549 keluarga

Sumber : BAPEL JPKM Kabupaten Purbalingga

Tabel 1.2. Jumlah peserta JPKM berdasarkan strata

Berdasarkan fakta yang dikemukakan diatas, maka data-data yang dikelola oleh suatu BAPEL akan menjadi sangat kompleks. Apabila administrasi data yang ada ini kurang terintegrasi dengan baik dan tidak didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai justru akan menurunkan efektivitas serta efisiensi dari JPKM itu sendiri, pada akhirnya kualitas pelayanan JPKM ini menjadi kurang baik.

Masalah sistem informasi manajemen JPKM ini dipandang sangat

serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan JPKM dan dapat memberi masukan kepada BAPEL JPKM.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan kepesertaan dalam sistem informasi manajemen JPKM di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana cara kerja sistem informasi manajemen JPKM di Kabupaten Purbalingga dalam hal pengelolaan kepesertaan selama ini?
3. Apakah sistem informasi manajemen JPKM di Kabupaten Purbalingga dapat mendukung kebutuhan informasi JPKM terpadu?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk lebih mengarahkan dan memperjelas arah serta maksud dari penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat diperinci sebagai berikut :

1. Mengetahui pengelolaan kepesertaan dalam sistem informasi manajemen JPKM yang ada pada BAPEL JPKM di Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui cara kerja sistem informasi manajemen JPKM yang ada pada BAPEL JPKM di Kabupaten Purbalingga dalam hal pengelolaan kepesertaan.
3. Merancang sistem informasi manajemen JPKM yang dapat memenuhi kebutuhan informasi di BAPEL JPKM secara optimal

1.4. Batasan Masalah

1. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada sistem informasi manajemen JPKM saja.
2. Pembatasan yang dilakukan hanya mengenai perancangan sistem informasi.
3. Tidak dilakukan analisis biaya yang diperlukan untuk pengembangan sistem.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi pihak penyedia layanan kesehatan masyarakat

- Terciptanya suatu sistem informasi manajemen yang dapat mendukung aktifitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- Terciptanya sistem informasi yang mudah dalam pengoperasian dan perawatan.
- Secara umum, dengan terciptanya sistem informasi ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai sistem informasi manajemen dan sebagai bahan studi banding bagi mahasiswa.

c. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek yang ada
diperoleh sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan.